



Penguatan *Political Awareness* Kader Partai melalui Model Baddeley–James Berbasis ABCD dalam Membangun Perilaku Politik Bijak di Kabupaten Kerinci

Jafar Ahmad¹⁾, Mahmud Hibatul Wafi²⁾, Hengki Firminda³⁾, Rhomiy Handican⁴⁾, Ade Putra Hayat⁵⁾, Agung Tri Prasetya⁶⁾, Syukron Saputra⁷⁾, M Nurzen S⁸⁾

^{1,2}Pemikiran Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

³Hukum dan Bisnis Islam, Universitas Riau, Indonesia

⁴Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

⁵Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

⁶Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

⁷Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

⁸Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Koresponden: jafarahmad@iainkerinci.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32939/rgk.v5i1.6913>

Abstract

This community engagement program aims to strengthen the political awareness of party cadres through the integration of the Baddeley–James model and the Asset-Based Community Development (ABCD) approach in Kerinci Regency. The primary issue addressed is the limited analytical capacity of cadres in understanding power dynamics, alongside suboptimal ethical political behavior. A participatory method was employed using the ABCD cycle (discovery, dream, design, define, and destiny), combined with training in reading and carrying skills. The results indicate significant improvements in political understanding, active participation, and behavioral transformation toward more critical, reflective, and ethical political practices. Participants were also able to apply these competencies in field activities, particularly in capturing public aspirations and formulating policy recommendations. Furthermore, the program produced a training module and an ABCD-based political awareness model with replication potential. These findings highlight that integrating cognitive and participatory approaches is effective in fostering political behavior transformation and strengthening substantive local democratic practices.

Keywords: *political awareness; political cadres; ABCD approach; political ethics; local democracy*

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat *political awareness* kader partai melalui integrasi model Baddeley–James dan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) di Kabupaten Kerinci. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kemampuan kader dalam membaca dinamika kekuasaan secara analitis serta belum optimalnya perilaku politik yang berorientasi pada etika dan kepentingan publik. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dengan tahapan ABCD (*discovery, dream, design, define, dan destiny*) yang dipadukan dengan pelatihan *reading skill* dan *carrying skill*. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman politik, partisipasi aktif, serta perubahan perilaku kader menuju pola yang lebih kritis, reflektif, dan berintegritas. Kader juga mampu mengaplikasikan

keterampilan melalui praktik lapangan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan rekomendasi kebijakan sederhana. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan modul pelatihan dan model *political awareness* berbasis ABCD yang berpotensi direplikasi. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan kognitif dan partisipatif efektif dalam mendorong transformasi perilaku politik serta memperkuat praktik demokrasi lokal yang lebih substantif.

Kata Kunci: political awareness; kader partai; ABCD; etika politik; demokrasi lokal

Pendahuluan

Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh kualitas aktor politik yang menjalankannya, khususnya kader partai politik sebagai agen utama dalam proses artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dalam konteks demokrasi kontemporer, penguatan kapasitas kader partai menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas dinamika politik dan tuntutan terhadap akuntabilitas publik. Norris (2011) menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada integritas dan kapasitas aktor politik dalam merespons tuntutan masyarakat. Selanjutnya, Dalton (2017) menunjukkan bahwa transformasi budaya politik modern menuntut aktor politik yang lebih responsif dan partisipatif. Mietzner (2013) juga menyoroti bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kaderisasi dan kualitas sumber daya politik. Sementara itu, Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa relasi patronase masih memengaruhi perilaku politik aktor di tingkat lokal, sehingga berdampak pada kualitas demokrasi substantif.

Kesadaran politik (*political awareness*) tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai sistem politik formal, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dinamika kekuasaan, relasi antaraktor, serta proses pengambilan keputusan yang berlangsung dalam praktik politik sehari-hari. Dalam konteks ini, kesadaran politik menjadi kompetensi strategis yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Hay (2011) menekankan bahwa politik harus dipahami sebagai proses yang melibatkan relasi kekuasaan yang kompleks dan seringkali tidak terlihat secara eksplisit. Leftwich (2010) juga menyatakan bahwa politik adalah inti dari proses distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Flinders (2012) menambahkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap politik dapat berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi demokratis. Pendekatan SkillsYouNeed (2019) memperkuat argumen ini dengan menekankan bahwa *political awareness* adalah kemampuan memahami bagaimana kekuasaan dan pengaruh bekerja dalam suatu sistem sosial.

Dalam perspektif pengembangan kapasitas individu, model *political awareness* yang dijelaskan dalam pendekatan Baddeley–James menekankan dua dimensi utama, yaitu kemampuan membaca situasi (*reading*) dan kemampuan bertindak (*carrying*). Kombinasi kedua dimensi ini menghasilkan tipologi perilaku politik yang beragam, mulai dari perilaku manipulatif hingga perilaku yang berintegritas. Ferris et al. (2012) mengembangkan konsep *political skill* sebagai kemampuan memahami orang lain dan menggunakan pemahaman tersebut untuk memengaruhi secara efektif dan etis. Ahearn et al. (2014) menunjukkan bahwa keterampilan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan dan kinerja organisasi. Goleman (2013) juga menegaskan bahwa kecerdasan emosional berperan penting dalam membentuk perilaku sosial dan kemampuan berinteraksi dalam lingkungan yang kompleks. Pendekatan SkillsYouNeed (2019) mengklasifikasikan perilaku politik ke dalam beberapa tipe, dengan tipe ideal adalah individu yang mampu menggabungkan kecerdasan analitis dan integritas moral (*wise actor* atau *owl*).

Namun demikian, dalam praktik politik di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Kerinci, masih ditemukan berbagai tantangan yang menunjukkan belum optimalnya tingkat *political awareness* kader partai. Fenomena pragmatisme politik, rendahnya sensitivitas terhadap

aspirasi masyarakat, serta praktik komunikasi politik yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai etika menjadi isu yang cukup dominan. Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena yang mengakar dalam politik elektoral di Indonesia. Hadiz (2010) menjelaskan bahwa dominasi oligarki dalam struktur politik lokal memengaruhi perilaku aktor politik. Winters (2011) juga menegaskan bahwa kekuatan oligarki dapat membatasi perkembangan demokrasi yang inklusif. Sementara itu, Hicken (2011) mengemukakan bahwa sistem patronase politik berkontribusi terhadap lemahnya rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik.

Di sisi lain, pendekatan konvensional dalam pendidikan politik cenderung masih berorientasi pada transfer pengetahuan dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pembentukan sikap serta perilaku. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik politik di lapangan. Mezirow (2012) menekankan pentingnya pembelajaran transformatif yang mampu mengubah perspektif individu melalui refleksi kritis. Kolb (2015) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun kompetensi praktis. Merriam dan Bierema (2014) juga menyatakan bahwa pembelajaran orang dewasa harus bersifat kontekstual dan partisipatif. Brookfield (2017) menambahkan bahwa refleksi kritis menjadi kunci dalam membangun kesadaran sosial dan perubahan perilaku.

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) menawarkan paradigma alternatif dalam pemberdayaan yang berfokus pada penguatan aset dan potensi yang dimiliki oleh individu maupun komunitas. Mathie dan Cunningham (2013) menjelaskan bahwa pendekatan ABCD mampu meningkatkan kapasitas komunitas melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Green dan Haines (2015) menegaskan bahwa pembangunan berbasis aset dapat menciptakan keberlanjutan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Phillips dan Pittman (2014) juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai faktor utama keberhasilan. Selain itu, Emery dan Flora (2016) menunjukkan bahwa penguatan modal sosial melalui pendekatan komunitas dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Integrasi antara model *political awareness* Baddeley–James dan pendekatan ABCD merupakan inovasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Model ini tidak hanya menekankan peningkatan kapasitas kognitif kader dalam memahami dinamika politik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku politik yang berintegritas melalui proses partisipatif berbasis komunitas. Gaventa dan Cornwall (2013) menekankan pentingnya ruang partisipasi dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi politik. Fung (2015) menunjukkan bahwa inovasi partisipatif dapat meningkatkan kualitas tata kelola demokrasi. Checkoway (2011) juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal merupakan kunci penguatan civic engagement. Sementara itu, Wampler dan Avritzer (2019) menunjukkan bahwa partisipasi publik yang terstruktur dapat meningkatkan akuntabilitas politik.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan kader partai yang memiliki *political awareness* tinggi dengan realitas kapasitas yang ada di lapangan, serta keterbatasan pendekatan pelatihan yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan *political awareness* kader partai, membentuk perilaku politik yang bijak dan berintegritas, serta mengembangkan model pemberdayaan berbasis ABCD yang dapat direplikasi secara lebih luas dalam mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Kualitas demokrasi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan perilaku kader partai politik sebagai aktor utama dalam proses representasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa tingkat *political awareness* kader partai belum berkembang secara optimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan kader dalam memahami dinamika kekuasaan secara komprehensif, termasuk dalam membaca relasi antaraktor politik, kepentingan yang bermain, serta proses pengambilan keputusan yang seringkali tidak bersifat formal. Kondisi ini menyebabkan kader partai cenderung bersikap reaktif dan kurang strategis dalam menjalankan peran politiknya, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, persoalan lain yang cukup menonjol adalah masih kuatnya praktik pragmatisme politik di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, aktivitas politik lebih didorong oleh kepentingan jangka pendek dibandingkan dengan orientasi pada kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam pola komunikasi politik yang kurang substantif, rendahnya komitmen terhadap nilai-nilai etika politik, serta kecenderungan untuk menggunakan pendekatan transaksional dalam membangun dukungan politik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas perilaku politik kader partai, tetapi juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik secara umum.

Di sisi lain, kader partai juga menghadapi tantangan dalam hal kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif. Banyak kader yang belum memiliki keterampilan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara sistematis, mengelola konflik kepentingan, serta menyampaikan pesan politik secara empatik dan konstruktif. Keterbatasan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan respons yang diberikan oleh aktor politik, sehingga aspirasi yang berkembang di tingkat akar rumput tidak selalu terakomodasi dengan baik dalam proses pengambilan kebijakan.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh pendekatan pendidikan dan pelatihan politik yang selama ini masih cenderung bersifat konvensional. Kegiatan pelatihan umumnya lebih berfokus pada penyampaian materi secara teoritis dan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pengalaman, refleksi, serta praktik langsung di masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pemahaman konseptual dengan kemampuan praktis kader dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks. Kader partai seringkali memiliki pengetahuan dasar tentang politik, tetapi belum mampu menerapkannya secara efektif dalam situasi nyata. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan potensi dan aset yang dimiliki oleh kader partai maupun komunitas lokal juga menjadi persoalan tersendiri. Padahal, setiap individu dan komunitas memiliki sumber daya sosial yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kapasitas politik. Kurangnya pendekatan yang berbasis pada penguatan aset menyebabkan proses pemberdayaan menjadi kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, yang mampu mengoptimalkan potensi lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penguatan kapasitas kader.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan utama masyarakat, khususnya kader partai politik di Kabupaten Kerinci, adalah adanya model penguatan *political awareness* yang tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku politik yang berintegritas. Kebutuhan ini mencakup peningkatan kemampuan dalam membaca dinamika politik (*reading skill*), kemampuan bertindak secara etis dan strategis (*carrying skill*), serta kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat secara partisipatif. Selain itu, diperlukan pendekatan pelatihan yang berbasis pada pengalaman dan praktik nyata, serta mampu memanfaatkan aset dan potensi lokal secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab

kebutuhan tersebut melalui implementasi model *political awareness* Baddeley–James yang diintegrasikan dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Model ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan cara membangun kapasitas kader partai secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku, sehingga dapat mendorong terwujudnya praktik politik yang lebih bijak, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Pendekatan dan Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang menekankan pada penguatan aset dan potensi yang dimiliki oleh individu maupun komunitas. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif kader partai dalam seluruh proses kegiatan sekaligus membangun rasa kepemilikan terhadap hasil yang dicapai. Secara konseptual, kegiatan ini mengintegrasikan model *political awareness* Baddeley–James yang berfokus pada dua dimensi utama, yaitu kemampuan membaca situasi politik (*reading*) dan kemampuan bertindak secara tepat (*carrying*), dengan siklus ABCD yang meliputi tahapan *discovery*, *dream*, *design*, *define*, dan *destiny*. Desain kegiatan bersifat edukatif dan transformatif, yaitu tidak hanya meningkatkan pengetahuan kader partai, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku politik menuju pola yang lebih bijak dan berintegritas.

Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan sasaran utama kader partai politik tingkat lokal, termasuk pengurus partai dan organisasi sayap partai, serta aktor muda yang aktif dalam kegiatan politik. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dalam aktivitas politik, representasi lintas partai, serta komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan memiliki potensi dampak yang lebih luas dalam lingkungan politik lokal.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap *discovery* yang berfokus pada pemetaan aset, yaitu mengidentifikasi kapasitas awal kader partai, pengalaman politik, serta jaringan sosial yang dimiliki, termasuk potensi komunitas yang dapat mendukung penguatan kapasitas kader. Proses ini dilakukan melalui wawancara awal, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok sehingga diperoleh gambaran kondisi awal peserta. Tahap berikutnya adalah *dream*, yaitu perumusan harapan bersama terkait praktik politik yang ideal melalui diskusi kelompok terarah dan *brainstorming* partisipatif. Selanjutnya, tahap *design* dilakukan dengan menyusun secara kolaboratif kurikulum pelatihan yang mencakup materi *political awareness*, etika politik, serta strategi komunikasi politik berbasis masyarakat.

Tahap *define* merupakan inti kegiatan yang meliputi pelatihan *reading skill* untuk meningkatkan kemampuan analisis aktor dan relasi kekuasaan, serta pelatihan *carrying skill* yang berfokus pada penguatan etika politik, integritas, dan komunikasi politik yang empatik. Selain itu, dilakukan simulasi tipologi perilaku politik melalui metode *role play* dan studi kasus untuk membantu peserta memahami berbagai karakter perilaku politik dan mengarahkan pada perilaku yang bijak dan berintegritas. Kegiatan ini dilanjutkan dengan praktik lapangan, di mana peserta terjun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan menyusun rekomendasi kebijakan sederhana. Tahap akhir adalah *destiny*, yang berfokus pada evaluasi dan keberlanjutan program melalui refleksi partisipatif dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, observasi partisipatif untuk melihat perubahan perilaku, wawancara untuk menggali pengalaman dan persepsi peserta, serta dokumentasi kegiatan sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, data kuantitatif dari hasil pre-test dan post-test dianalisis dengan membandingkan skor rata-rata dan persentase peningkatan yang terjadi.

Indikator Keberhasilan dan Luaran

Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui peningkatan pemahaman peserta terhadap dinamika politik, perubahan sikap menuju perilaku politik yang lebih etis, serta kemampuan peserta dalam menerapkan komunikasi politik yang bijak dan menyusun aspirasi masyarakat secara konstruktif. Selain itu, keberhasilan juga ditandai dengan tersusunnya modul pelatihan dan model *political awareness* berbasis ABCD yang dapat direplikasi. Adapun luaran kegiatan meliputi artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat, modul pelatihan kader partai, serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari praktik lapangan peserta.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Discovery (Pemetaan Aset)

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, dilakukan proses identifikasi dan pemetaan aset yang dimiliki oleh kader partai serta komunitas politik lokal di Kabupaten Kerinci. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kader partai pada umumnya telah memiliki pengalaman praktis dalam aktivitas politik, terutama dalam kegiatan kampanye, mobilisasi massa, dan kegiatan organisasi partai. Namun demikian, pengalaman tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan analitis dalam memahami dinamika kekuasaan dan relasi antaraktor politik. Di sisi lain, ditemukan bahwa kader memiliki potensi jaringan sosial yang cukup kuat, baik dalam lingkungan masyarakat maupun organisasi, yang berpotensi menjadi modal penting dalam penguatan kapasitas politik. Selain itu, terdapat pula aset berupa kedekatan kader dengan masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun komunikasi politik yang lebih partisipatif dan responsif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam aspek *political awareness*, kader partai memiliki sumber daya sosial yang signifikan untuk dikembangkan.

Tabel 1. Hasil Pemetaan Aset Kader Partai pada Tahap Discovery

No	Aspek yang Diidentifikasi	Temuan Lapangan	Kategori Penilaian	Implikasi terhadap Kegiatan
1	Pengalaman Praktis Politik	Kader memiliki pengalaman dalam kampanye, mobilisasi massa, dan aktivitas organisasi partai	Tinggi	Menjadi modal awal dalam penguatan kapasitas politik berbasis pengalaman
2	Kemampuan Analisis Politik	Kemampuan dalam memahami dinamika kekuasaan dan relasi antaraktor masih terbatas	Rendah	Mebutuhkan intervensi melalui pelatihan <i>reading skill</i>
3	Jaringan Sosial	Kader memiliki jaringan sosial yang luas di masyarakat dan organisasi	Tinggi	Berpotensi mendukung efektivitas komunikasi dan mobilisasi politik

4	Kedekatan dengan Masyarakat	Hubungan kader dengan masyarakat cukup erat dan komunikatif	Tinggi	Dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi politik partisipatif
5	<i>Political Awareness</i>	Kesadaran politik masih bersifat praktis, belum analitis dan reflektif	Sedang	Perlu penguatan melalui integrasi <i>reading</i> dan <i>carrying skill</i>
6	Potensi Aset Komunitas	Tersedia potensi sosial yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan politik	Tinggi	Mendukung penerapan pendekatan ABCD dalam kegiatan

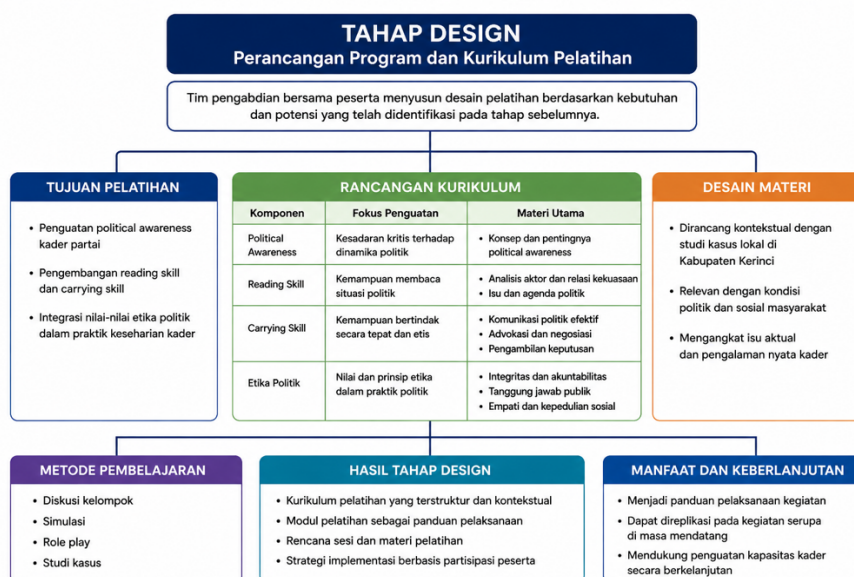
Berdasarkan **Tabel 1**, terlihat bahwa kader partai memiliki kekuatan utama pada aspek pengalaman praktis dan jaringan sosial, namun masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan analitis politik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman empiris dengan kapasitas reflektif, sehingga diperlukan intervensi melalui pendekatan *political awareness* yang terstruktur.

Tahap Dream (Perumusan Harapan)

Pada tahap *dream*, peserta diajak untuk merefleksikan kondisi praktik politik yang ada serta merumuskan harapan terhadap karakter kader politik yang ideal. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta memiliki kesadaran awal terhadap pentingnya perubahan perilaku politik menuju pola yang lebih etis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peserta mengidentifikasi bahwa kader politik yang ideal adalah individu yang tidak hanya cerdas dalam membaca situasi, tetapi juga memiliki integritas, mampu berkomunikasi secara empatik, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, peserta juga mengungkapkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas dalam memahami dinamika politik secara lebih mendalam dan sistematis. Tahap ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai arah perubahan yang diinginkan, yaitu transformasi kader menuju perilaku politik yang bijak dan berintegritas.

Tahap Design (Perancangan Program)

Pada tahap *design*, tim pengabdian bersama peserta menyusun desain pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Hasil dari tahap ini berupa kurikulum pelatihan yang mencakup penguatan *political awareness* melalui pengembangan *reading skill* dan *carrying skill*, serta integrasi nilai-nilai etika politik dalam praktik keseharian kader. Materi pelatihan dirancang secara kontekstual dengan mengangkat studi kasus lokal yang relevan dengan kondisi politik di Kabupaten Kerinci. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan bersifat partisipatif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan *role play*, sehingga mampu mendorong keterlibatan aktif peserta. Tahap ini juga menghasilkan modul pelatihan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan berpotensi untuk direplikasi pada kegiatan serupa di masa mendatang.



Gambar 1. Hasil Tahap Design

Tahap Define (Pelaksanaan Program Inti)

Tahap *define* merupakan inti dari kegiatan pengabdian, di mana seluruh desain program diimplementasikan secara langsung kepada peserta. Hasil pelaksanaan pelatihan *reading skill* menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menganalisis dinamika politik lokal, termasuk dalam mengidentifikasi aktor-aktor kunci, memahami relasi kekuasaan, serta mengenali kepentingan yang memengaruhi proses politik. Peserta menjadi lebih kritis dan sistematis dalam melihat fenomena politik yang terjadi di sekitarnya.

Sementara itu, pelatihan *carrying skill* menunjukkan perubahan yang signifikan dalam aspek sikap dan perilaku politik. Peserta mulai menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab dalam praktik politik. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menyampaikan pendapat secara lebih terstruktur, menghargai perbedaan pandangan, serta menghindari pendekatan manipulatif dalam interaksi politik.

Simulasi tipologi perilaku politik yang dilakukan melalui *role play* memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai berbagai karakter perilaku politik. Peserta mampu mengidentifikasi kecenderungan perilaku masing-masing serta memahami konsekuensi dari setiap tipe perilaku. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran kecenderungan dari perilaku pasif atau pragmatis menuju perilaku yang lebih bijak dan reflektif. Selain itu, praktik lapangan yang dilakukan oleh peserta menunjukkan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Kader partai mampu melakukan penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih sistematis dan partisipatif, serta menyusun rekomendasi kebijakan sederhana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi yang terbangun antara kader dan masyarakat juga menunjukkan peningkatan kualitas komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.

Tahap Destiny (Evaluasi dan Keberlanjutan)

Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, serta perubahan perilaku yang teramati selama kegiatan berlangsung. Peserta menunjukkan sikap yang lebih aktif, kritis, dan terbuka dalam proses diskusi maupun dalam praktik lapangan.

Selain itu, refleksi partisipatif yang dilakukan pada tahap ini menghasilkan komitmen peserta untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam aktivitas politik sehari-hari.

Tahap ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa penguatan jejaring antar kader partai serta pengembangan kegiatan serupa secara berkelanjutan. Modul pelatihan dan model *political awareness* berbasis ABCD yang dihasilkan dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk keberlanjutan program yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas kader di daerah lain. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong transformasi praktik politik yang lebih luas dan berkelanjutan.

Tabel 2. Hasil Evaluasi dan Keberlanjutan pada Tahap *Destiny*

No	Aspek Evaluasi	Indikator	Hasil Temuan	Kategori Perubahan	Implikasi
1	Peningkatan Pemahaman	Perbandingan hasil pre-test dan post-test	Terjadi peningkatan signifikan skor pemahaman peserta	Tinggi	Menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan <i>political awareness</i>
2	Perubahan Sikap	Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi	Peserta lebih aktif, kritis, dan terbuka dalam menyampaikan pendapat	Tinggi	Menguatkan kapasitas kader dalam komunikasi politik partisipatif
3	Perubahan Perilaku	Praktik interaksi dalam kegiatan dan lapangan	Peserta menunjukkan perilaku lebih reflektif, etis, dan responsif	Sedang–Tinggi	Mendorong terbentuknya perilaku politik yang lebih bijak
4	Refleksi Partisipatif	Komitmen terhadap nilai yang dipelajari	Peserta menyatakan komitmen menerapkan nilai dalam aktivitas politik sehari-hari	Tinggi	Menjadi dasar perubahan jangka panjang
5	Keberlanjutan Program	Rencana tindak lanjut kegiatan	Terbentuk rencana penguatan jejaring antar kader partai	Tinggi	Memperluas dampak kegiatan secara kolektif
6	Replikasi Program	Pengembangan kegiatan serupa	Program dirancang untuk dapat direplikasi di daerah lain	Tinggi	Mendukung skalabilitas model pengabdian
7	Produk Kegiatan	Modul dan model pelatihan	Tersusun modul pelatihan dan model <i>political awareness</i> berbasis ABCD	Tinggi	Menjadi panduan implementasi program lanjutan
8	Dampak Jangka Panjang	Potensi transformasi praktik politik	Teridentifikasi potensi perubahan praktik politik yang lebih luas dan berkelanjutan	Sedang–Tinggi	Berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas individu peserta, tetapi juga membentuk komitmen kolektif serta keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mampu memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang dalam penguatan *political awareness* kader partai.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan *political awareness* kader partai melalui integrasi model Baddeley–James dan pendekatan ABCD mampu meningkatkan kapasitas kognitif dan reflektif peserta dalam memahami dinamika politik. Peningkatan ini

terlihat dari kemampuan kader dalam menganalisis aktor, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang sebelumnya cenderung dipahami secara sederhana. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hay (2011) yang menegaskan bahwa politik tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga melibatkan relasi kekuasaan yang kompleks dan seringkali tidak terlihat secara eksplisit. Selain itu, Leftwich (2010) menekankan bahwa kemampuan memahami distribusi kekuasaan merupakan inti dari kesadaran politik. Hasil ini juga diperkuat oleh Norris (2011) yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kapasitas aktor politik dalam memahami dan merespons dinamika sosial-politik. Dalam konteks ini, peningkatan *reading skill* yang diperoleh peserta menunjukkan adanya penguatan dimensi kognitif dalam *political awareness*.

Pada aspek perilaku, kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sikap dan cara kader berinteraksi dalam konteks politik. Peserta menjadi lebih terbuka, kritis, dan menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan nilai etika dalam praktik politik. Transformasi ini mencerminkan keberhasilan penguatan dimensi *carrying skill* yang tidak hanya berfokus pada kemampuan bertindak, tetapi juga pada integritas dan tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan Ferris et al. (2012) yang menyatakan bahwa *political skill* mencakup kemampuan memengaruhi orang lain secara efektif tanpa mengabaikan nilai etika. Selain itu, Ahearn et al. (2014) menunjukkan bahwa kemampuan politik yang disertai integritas berkontribusi terhadap efektivitas kepemimpinan. Goleman (2013) juga menegaskan bahwa kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial yang adaptif dan etis. Dengan demikian, perubahan perilaku yang terjadi dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan *political awareness* tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku.

Simulasi tipologi perilaku politik yang dilakukan dalam kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran reflektif peserta terhadap posisi dan kecenderungan perilaku mereka. Pergeseran dari pola perilaku pasif atau pragmatis menuju perilaku yang lebih bijak menunjukkan bahwa peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan dalam pelatihan. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran transformatif yang menekankan pentingnya refleksi kritis dalam mengubah perspektif individu. Mezirow (2012) menyatakan bahwa pembelajaran transformatif terjadi ketika individu mampu merefleksikan asumsi yang dimiliki dan mengubahnya menjadi kerangka berpikir baru. Brookfield (2017) juga menegaskan bahwa refleksi kritis merupakan kunci dalam membangun kesadaran sosial dan perubahan perilaku. Selain itu, Kolb (2015) menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman, seperti simulasi dan praktik lapangan, sangat efektif dalam membentuk kompetensi praktis. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih mendalam.

Pendekatan ABCD yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kader partai dalam proses pembelajaran. Dengan menekankan pada penguatan aset yang dimiliki peserta, kegiatan ini mampu membangun rasa percaya diri dan kepemilikan terhadap proses perubahan. Hasil ini sejalan dengan Mathie dan Cunningham (2013) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis aset mampu meningkatkan kapasitas komunitas melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Green dan Haines (2015) juga menegaskan bahwa pembangunan berbasis aset lebih berkelanjutan karena berakar pada kekuatan internal komunitas. Selain itu, Phillips dan Pittman (2014) menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dalam konteks ini, keberhasilan kegiatan menunjukkan bahwa integrasi ABCD dengan model *political awareness* dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam penguatan kapasitas politik kader partai.

Dari perspektif demokrasi lokal, kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik dan hubungan antara kader partai dan masyarakat.

Praktik lapangan yang dilakukan peserta menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara lebih sistematis dan dialogis. Hal ini sejalan dengan Gaventa dan Cornwall (2013) yang menekankan pentingnya ruang partisipasi dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi politik. Fung (2015) juga menunjukkan bahwa inovasi partisipatif dapat meningkatkan kualitas tata kelola demokrasi. Selain itu, Wampler dan Avritzer (2019) menegaskan bahwa partisipasi publik yang terstruktur dapat meningkatkan akuntabilitas politik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada individu kader, tetapi juga pada penguatan praktik demokrasi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, hasil pada tahap *destiny* menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki potensi keberlanjutan yang kuat melalui komitmen peserta dan adanya rencana tindak lanjut. Tersusunnya modul pelatihan dan model *political awareness* berbasis ABCD menjadi salah satu bentuk konkret dari keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan Emery dan Flora (2016) yang menekankan pentingnya penguatan modal sosial dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Checkoway (2011) juga menyatakan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dan komitmen peserta. Selain itu, Wiggins dan Heffernan (2017) menegaskan bahwa keberlanjutan program sosial memerlukan integrasi antara pembelajaran, praktik, dan jejaring sosial. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya terletak pada capaian jangka pendek, tetapi juga pada potensi transformasi jangka panjang dalam praktik politik kader partai.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi model *political awareness* Baddeley–James dengan pendekatan ABCD merupakan inovasi yang efektif dalam penguatan kapasitas kader partai. Model ini mampu menjawab kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik politik, serta mendorong terbentuknya perilaku politik yang lebih bijak, partisipatif, dan berintegritas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan demokrasi tidak hanya memerlukan reformasi institusional, tetapi juga pengembangan kapasitas aktor politik secara berkelanjutan. Dengan demikian, model yang dikembangkan dalam kegiatan ini memiliki relevansi yang tinggi untuk direplikasi dalam konteks yang lebih luas guna mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan *political awareness* kader partai melalui integrasi model Baddeley–James dan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) mampu meningkatkan kapasitas kognitif, sikap, dan perilaku politik secara komprehensif. Hasil kegiatan mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan kader dalam membaca dinamika kekuasaan, mengelola interaksi politik secara etis, serta membangun komunikasi yang lebih partisipatif dengan masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis aset terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta dan memperkuat keberlanjutan program melalui pemanfaatan potensi lokal. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong transformasi praktik politik yang lebih bijak, partisipatif, dan berintegritas di tingkat lokal serta dapat direplikasi dalam konteks yang lebih luas.

Referensi

- Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Douglas, C., & Ammeter, A. P. (2014). Leader political skill and team performance. *Journal of Management*, 40(5), 1426–1450. <https://doi.org/10.1177/0149206311421833>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage, and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a critically reflective teacher* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Checkoway, B. (2011). What is youth participation? *Children and Youth Services Review*, 33(2), 340–345. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.09.017>
- Dalton, R. J. (2017). *The participation gap: Social status and political inequality*. Oxford University Press.
- Emery, M., & Flora, C. (2016). Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework. *Community Development*, 47(4), 495–514. <https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1177794>
- Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewé, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C., & Lux, S. (2012). Political skill in organizations. *Journal of Management*, 38(1), 290–320. <https://doi.org/10.1177/0149206311419662>
- Flinders, M. (2012). *Defending politics: Why democracy matters in the twenty-first century*. Oxford University Press.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Gaventa, J., & Cornwall, A. (2013). Power and knowledge. In *The SAGE handbook of development studies* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Goleman, D. (2013). *Focus: The hidden driver of excellence*. HarperCollins.
- Green, G. P., & Haines, A. (2015). *Asset building & community development* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hay, C. (2011). *Why we hate politics*. Polity Press.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Leftwich, A. (2010). *What is politics? The activity and its study*. Polity Press.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2013). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 23(4), 474–486. <https://doi.org/10.1080/09614524.2013.781127>
- Mezirow, J. (2012). *Transformative learning theory*. In E. W. Taylor & P. Cranton (Eds.), *The handbook of transformative learning*. Jossey-Bass.
- Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2014). *Adult learning: Linking theory and practice*. Jossey-Bass.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Phillips, R., & Pittman, R. H. (2014). *An introduction to community development* (2nd ed.). Routledge.
- SkillsYouNeed. (2019). Political awareness. Retrieved from <https://www.skillsyouneed.com/ips/political-awareness.html>
- Wampler, B., & Avritzer, L. (2019). Participatory institutions in democratic Brazil. *World Development*, 122, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.009>
- Wiggins, N., & Heffernan, M. (2017). Community health workers and community empowerment. *Journal of Community Practice*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/10705422.2017.1283602>

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.